BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan telah lama menjadi faktor yang membuat interaksi antar bangsa di Nusantara ataupun antara bangsa di Nusantara dengan bangsa di belahan bumi lainya menjadi sangat intensif. Sistem perdagangan yang terbentuk menempatkan mayoritas kerajaan di Nusantara terlibat dalam perdagangan internasional maupun domestik.

Sistem perdagangan Nusantara terbentuk selama berabad-abad sehingga telah menjadi suatu jaringan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, bahkan telah menjadi sebuah jaringan kultural. Tome Pires seorang juru tulis Portugis telah menuliskan kebesaran sistem ini, terutama pada saat kejayaan kesultanan Malaka yang menjadi pusat perdagangan Nusantara hingga abad ke-16. Malaka menjadi tempat berkumpulnya para pedagang dengan membawa komoditi-komoditi yang diperdagangkan dari seluruh penjuru Nusantara. Pada saat itu posisi Malaka adalah sebagai penghubung perdagangan Nusantara ke jalur-jalur perdagangan yang membentang ke barat sampai India, Persia, Arabia, Suriah, Afrika Timur, dan Laut Tengah; ke utara sampai Siam dan Pegu; serta ke timur sampai Cina dan Jepang. Ini merupakan sistem perdagangan yang terbesar di dunia pada masa itu (Ricklefs, 2009, hlm.39).

Transportasi laut menjadi satu-satunya alat untuk menghubungkan interaksi antar pulau di Nusantara, terutama pada abad-abad awal sebelum ditemukannya pesawat terbang. Transportasi laut membutuhkan sarana pelabuhan sebagai tempat interaksi baik itu ekonomi, sosial, budaya ataupun politik. Hal ini tentu membuat mayoritas kerajaan-kerajaan di Nusantara memiliki pelabuhan untuk berinteraksi dengan dunia luar.

Peradaban Indonesia sejak berabad-abad lalu berkembang lewat laut,

membuat sebagian besar pusat peradaban yang ada di Indonesia berkembang di

wilayah pesisir. Dalam hal ini menurut Sulistiyono (2004, hlm.12) kota-kota

dagang yang berkembang di Nusantara pada abad-abad 16 sampai 17 antara lain

Banten, Batavia, Cirebon, Semarang, Demak, Rembang, Tuban, Pasuruan, Gresik,

Surabaya, Probolinggo, Panarukan, Pamekasan, Buleleng, Lampung, Palembang,

Banjarmasin, Pontianak, Sampit, Sambas, Makasar, Sumba, Kupang, Larantuka,

dan sebagainya.

Batavia merupakan salah satu pelabuhan yang menjadi sangat besar dan

berpengaruh sejak abad ke-17. Banyak faktor yang membuatnya menjadi begitu

besar dan berpengaruh pada abad itu dan abad-abad setelahnya. Kedatangan para

pedagang dari negeri Belanda sejak 1596 dibawah pimpinan Cornelis De

Houtman disebut-sebut sebagai awal terbukanya pintu bagi para pedagang

Belanda di Nusantara. Ia dan keempat kapal yang dipimpinnya merupakan

perintis dari armada besar yang akan datang dikemudian hari. Meskipun bagi

Indonesia mereka hanyalah pelawat yang datang dan pergi dan segera dilupakan.

Pada awal kedatangan pedagang-pedagang Belanda, raja-raja di Indonesia

menganggap kehadiran mereka sebagai sebuah keuntungan. Persaingan antara

Belanda dan Portugis yang sudah lebih dahulu berdagang di Nusantara, dan lebih-

lebih lagi antara perusahaan dagang Belanda yang berbeda-beda membuat

keuntungan berlipat ganda sehingga harga lada, cengkeh, dan pala melonjak

dalam beberapa tahun.

Parlemen Belanda (Staten-Generaal), pada Maret 1602 membentuk VOC

(Vereenidge Oostindische Compagnie) guna mengakhiri persaingan internal antar

pedagang Belanda yang merugikan pihak Belanda. VOC pun diserahi monopoli

dan wewenang atas segala perniagaan di Asia (Vlekke, 2010, hlm.132). Dalam hal

ini Boxer (1983, hlm.9) mengemukakan dua sebab utama yang menyebabkan

perlunya di bentuk persatuan perusahaan dagang: "guna menimbulkan bencana

pada musuh dan guna keamanan tanah air". Lohanda (2007, hlm.2)

Deri Septi Efendi, 2015

PERANAN JAN PIETERSZOON COEN DALAM MEMBANGUN BATAVIA SEBAGAI KOTA PELABUHAN

menambahkan bahwa VOC mempunyai hak dari pemerintahnya tidak hanya melakukan kegiatan dagang di perairan Asia-Afrika, tetapi juga hak-hak untuk bertindak sebagai suatu kekuasaan yang berdaulat yang dalam kaitannya hak ini membuat VOC bisa mengadakan perjanjian dengan para penguasa setempat, melancarkan peperangan untuk menjamin praktek monopoli kepentingan perdagangannya. Ini artinya, VOC adalah perusahaan dagang yang secara tidak langsung merupakan kepanjangan tangan dari negara Belanda. Lohanda (2007, hlm.23-24) menjelaskan mengenai struktur VOC sebagai sebuah perusahaan dagang:

VOC merupakan sebuah perusahaan dagang di Belanda yang merupakan gabungan dari sejumlah kamar dagang di enam kota: Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, Delft, Hoorn, dan Enkhyusen (Lohanda, 2007, hlm. 2). Saham terbesar berasal dari Amsterdam (50%), Zeeland (25%), dan sisanya dari kota lainnya.

Kepengurusan VOC dipegang oleh 17 orang yang disebut *Heeren Seventien* atau Dewan 17. Komposisi kepengurusan Heeren Seventien masing-masing dewan mewakili semua kamar dagang yang tergabung dalam VOC. Sebagai pemilik saham/modal terbesar, maka Amsterdam mempunyai wakil yang terbanyak, yaitu 8 orang.

Daerah operasi VOC mencakup Afrika Timur, wilayah perairan Lautan India, Laut Cina Selatan sampai ke Pasifik. Kantor-kantor dagang didirikan VOC di Kapstadt (Capetown), di Teluk Ormudz (Persia, atau sekarang Iran), disepanjang pantai Malabar dan Koromandel di India, Srilanka, kepulauan Nusantara, Formosa (Taiwan) sampai pulau Deshima di Jepang.

VOC sejak didirikan sampai kemudian dibubarkan pada 1799 pernah dipimpin oleh 37 Gubernur Jenderal di masa kekuasaannya, tetapi yang benarbenar terlibat langsung dalam urusan kota Batavia ada 34 Gubernur Jenderal. Dimulai dengan Jan Pieterzoon Coen yang dua kali memerintah (1619-1623, 1627-1629) sampai kepada Pieter Gerardus van Overstraten (1786-1801). Yang menarik dari ke dua Gubernur Jenderal ini adalah Jan Pieterszoon Coen yang memulai pemerintahan VOC di Batavia, sementara Van Overstraten yang memulai perpindahan pusat pemerintahan di Kastil Batavia yang termasuk wilayah *Stad en Voorsteden* (sekarang Jakarta Utara dan Barat) ke *Weltevreden*

(sekarang Jakarta Pusat) yang juga merupakan akhir dari masa VOC dan berganti

ke pemerintahan langsung kerajaan Belanda yang kemudian kita mengenal

Nusantara sebagai Hindia Belanda (Lohanda, 2007, hlm.6).

Setelah berniaga selama 20 tahun di Hindia, para direktur VOC

menganggap keadaannya masih sangat tidak memuaskan. VOC memang telah

memperoleh pijakan di pulau Ambon dan cukup kekuasaan di Maluku, tapi

persaingan di pasar rempah masih tetap ketat, dan dengan harga-harga yang

meningkat, khususnya biaya besar yang dituntut oleh perang, keuntungan yang

berhasil diperoleh VOC masih kecil (Vlekke, 2010, hlm.146).

Reorganisasi total sistem komersial VOC harus segera dilakukan untuk

bisa menjamin keuntungan yang sebesar-besarnya. Beberapa proposal untuk

reorganisasi sampai ke para Direktur pada dekade kedua abad ke-17. Yang paling

menarik adalah "Wacana mengenai Negara Hindia" oleh Jan Pieterszoon Coen

yang terkenal. Coen mendasarkan pendapatnya pada dua argumen: pertama,

bahwa perdagangan dengan timur perlu untuk kesejahteraan Republik Belanda,

dan kedua, bahwa orang Belanda punya hak legal untuk meneruskan perdagangan

ini dan bahkan memonopoli perdagangan di banyak tempat. Ide dari Coen inilah

yang menjadi cikal-bakal terciptanya kolonialisme Belanda di Nusantara (Vlekke,

2010, hlm.148-149).

Ide Pembentukkan Negara Hindia oleh Coen didasari oleh beberapa

masalah yang menurutnya menghambat VOC untuk memonopoli perdagangan di

Nusantara, diantaranya adalah penyelundupan terus menerus antara Jawa dan

Maluku kemudian ancaman yang sewaktu-waktu bisa datang dari Inggris dengan

EIC-nya sebagai pesaing. Saran Coen ialah menjaga kepentingan VOC dengan

mendirikan pemukiman Belanda (Vlekke, 2010, hlm.150) dan memastikan

kepemilikan total atas beberapa wilayah penting, misalnya pulau Bacan di

Maluku, Ambon, dan Banda, dan pelabuhan berbenteng di Banten atau Jayakarta.

Kemudian Coen menginginkan VOC membawa kelompok orang-orang Belanda

ke tempat itu dan memberikan mereka hak atas tanah dan izin untuk berdagang di

pelabuhan-pelabuhan Asia, kemudian mengirim armada yang cukup kuat untuk

menaklukan Manila dan Makao sebagai upaya terbesar untuk menguasai jaringan

perdagangan Asia.

Coen berpendapat bahwa dengan mereformasi sistem komersial bukan

hanya semua ongkos di Nusantara akan tertutup, tapi keuntungan tahunan sebesar

lima juta Gulden bisa didapat dari perdagangan antar-Asia dan lima juta lagi kalau

perdagangan Cina dapat dimasukkan ke dalam sistem itu. Untuk itu Coen butuh

pemukiman orang Belanda yang akan menangani produksi rempah-rempah

(Vlekke, 2010, hlm.151).

Misi pertama yang dilakukan oleh Coen adalah membuat Rendez Vouz.

"Rendez Vouz (berasal dari bahasa Perancis) memiliki definisi tempat bertemu

atau tempat pertemuan, Yaitu tempat bertemunya kapal-kapal yang membawa

komoditi-komoditi dari seluruh Nusantara. Rendez Vouz bisa juga diartikan

sebagai Port, menurut Roads Murphey, dalam Sulistiyono (2004, hlm.149) :

Port mengacu pada konsep ekonomi, yaitu pelabuhan yang dipandang sebagai tempat atau pusat tukar menukar atau keluar masuknya barang

komoditas antara daerah Hinterland dengan Foreland. Pelabuhan yang mengacu pada konsep ekonomi, selain berfungsi sebagai tempat / pusat tukar menukar atau keluar masuknya barang perdagangan, juga menjadi

salah satu syarat sifat kosmopolitannya suatu wilayah atau kota karena

adanya dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

VOC berusaha menemukan sebuah lokasi yang dapat dijadikan kantor

pusat di Asia (Suroyo et.al, 2012, hlm.27). Pada awalnya pilihan ditujukan kepada

Banten atau Ambon. Banten memang merupakan pelabuhan yang ramai dan

tempat untuk berdagang yang menjanjikan. Tetapi Kesultanan Banten adalah

kerajaan dagang yang kuat, besar pengaruhnya di wilayah perdagangan Asia,

sehingga tidak mudah untuk menghantam Banten demi untuk memperoleh tempat

bercokol. Apalagi di Banten sendiri banyak pedagang-pedagang asing yang sudah

lebih dahulu mempunyai hubungan baik dengan Sultan Banten, salah satunya

adalah Inggris yang merupakan saingan besar VOC. Sedangkan Ambon yang

terletak di pusat wilayah penghasil rempah-rempah rupanya tidak lagi menarik

minat VOC karena tidak ideal dari segi lokasi yang berada di ujung timur jaringan

perdagangan. Padahal mereka sudah terlebih dahulu mendirikan Loji atau Kantor

dagang merangkap gudang dan tempat tinggal di Hitu, di pulau Ambon, sejak

1605, VOC tidak lagi menganggap Ambon tempat yang strategis bagi

kepentingan mereka di belahan dunia timur (Lohanda, 2007, hlm.3).

Dengan berbagai pertimbangan akhirnya para pembesar VOC (Hereen

Seventien) memutuskan bahwa tempat yang strategis adalah Jayakarta. Meskipun

Inggris dengan EIC-nya pun telah memiliki Loji di kota Pelabuhan ini. Status

Jayakarta sebagai Vazal atau daerah kekuasaan Banten tentu merupakan ancaman

bagi Belanda karena bisa kapan saja diserang dan diblokir perairannya oleh

Banten (Lohanda, 2007, hlm.4).

Dipilihnya Jayakarta Sebagai Kota Pelabuhan atau Rendez Vouz menurut

Sulistiyono (2004, hlm.12) adalah karena dari sebagian banyak rute pelayaran dan

perdagangan di perairan Nusantara, rute pelayaran dan perdagangan yang

melintasi laut Jawa-lah yang paling ramai. Hal itu mudah dipahami karena laut

Jawa terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Laut jawa memiliki ombak

yang relatif kecil dibandingkan dengan laut-laut yang ada di Indonesia dan

sekitarnya seperti laut Cina Selatan, Samudera Hindia, Samudera Pasifik, Laut

Arafuru, Laut Banda, dan sebagainya sehingga cocok untuk pelayaran dan

perdagangan. Di samping itu laut Jawa memiliki kedudukan yang strategis dalam

jalur lalu lintas perdagangan dunia yang ramai antara Malaka-Jawa-Maluku.

Dalam konteks itu laut Jawa juga berfungsi sebagai jembatan penghubung pusat-

pusat dagang di sepanjang pantai yang berkembang karena pelayaran dan

perdagangan melalui laut Jawa.

Coen menginginkan rendez vouz ini bisa menjadi pusat administrasi VOC

dan juga pusat komando dalam mengkoordinir kegiatan dagang di wilayah

Perairan Timur yang sangat luas. Sebelum berdiri kantor pusat di Batavia, urusan

VOC di Asia langsung ditangani oleh Staaten General di Den Haag. Akan tetapi

dengan adanya Batavia, semua urusan itu diserahkan kepada Gubernur Jenderal di

Deri Septi Efendi, 2015

PERANAN JAN PIETERSZOON COEN DALAM MEMBANGUN BATAVIA SEBAGAI KOTA PELABUHAN

Batavia (Suroyo et.al, 2012, hlm.27). Sehingga semua laporan dari kantor-kantor dagang tersebut yang akan dikirim ke Belanda harus melalui Batavia. Batavia juga menjadi tempat tujuan bagi para pegawai yang ingin mendapatkan pemindahan tugas dan promosi, semua lembaga penting VOC di Asia ditempatkan di Batavia, yaitu Dewan Pemerintahan Asia, Pengadilan Tinggi, Kantor Kepala Pembukuan dan Gudang-gudang (Taylor, 2009, hlm.4). Dengan sendirinya kota ini tidak hanya menjadi sibuk dengan kapal-kapal yang datang dan pergi, bongkar muat barang, atau yang hanya sekedar singgah sambil membawa berbagai berita dari tempat-tempat yang dikunjungi (Lohanda, 2007, hlm.25). Disinilah awal dari sejarah Jayakarta yang kemudian menjadi Batavia yang termashur. Hal ini menjadi menarik karena menurut Kartodirdjo (1988, hlm.155) Jayakarta pada awal kedatangan bangsa barat sudah kurang berarti sebagai pelabuhan, hanya tempat singgah untuk mengambil air bersih dan bahan makanan segar.

Untuk dapat menguasai Batavia (Jayakarta) Coen memutuskan untuk menghadapi Banten terlebih dahulu. Dia menghentikan semua pembelian lada dan mengancam akan memindahkan pabriknya ke Jayakarta (Vlekke, 2010, hlm.155). Hal ini dapat dipahami karena pada abad ke-17 Banten merupakan pelabuhan yang sangat berpengaruh di Jawa, maka dengan memblokade Banten akan membuat Batavia dikemudian hari menjadi satu-satunya pelabuhan paling berpengaruh di Jawa bahkan kemudian menjadi sangat berpengaruh di seluruh Nusantara.

Coen memerintahkan gudang VOC di Jayakarta untuk secara rahasia diubah menjadi benteng yang andal, raja Jayakarta mengetahui apa yang terjadi dan memprotes sambil meminta bantuan Inggris, kemudian Coen memindahkan kantor pusatnya ke Jayakarta dan menyerang satu kubu pertahanan yang dibuat penduduk di seberang pemukiman Belanda hingga membakar habis pos dagang Inggris. Menyadari kekuatan pasukan yang dipimpinnya ia pun mundur. Keadaan di Jayakarta lebih baik dari yang diperkirakan Coen, karena benteng Belanda selamat. Hal ini disebabkan karena Inggris dan Jayakarta tidak bisa sepakat siapa yang akan memilikinya setelah ditaklukan. Sementara raja Banten tidak mau

membiarkan salah satu dari mereka memilikinya. Banten akhirnya mengambil

alih Jayakarta dan mengusir rajanya, Inggris mundur dalam kebingungan dan

ketakutan akan nasib pemukiman dan barang mereka di pelabuhan Banten. Hal ini

memberikan keberanian baru kepada garnisun Belanda. Pada akhirnya mereka

menemukan benteng itu tanpa nama dan menamainya Batavia pada 12 maret

1619. Pada 28 Mei sang Gubernur Jenderal memasuki Benteng Batavia (Vlekke,

2010, hlm.155).

Pada tanggal 30 Mei 1619 pasukan VOC dibawah pimpinan Jan

Pieterszoon Coen berhasil merebut kota Jayakarta. Semua yang ada dimusnahkan,

penduduknya menyingkir ke daerah lain atau bertahan di wilayah pedalaman.

Mulai saat itu dibuka babak baru dalam sejarah kehidupan di Jayakarta (Lohanda,

2007, hlm.4).

Pada awalnya Coen menamakan kota yang baru didirikan ini dengan nama

Nieuw Hoorn, untuk mengenang kota kelahirannya di negeri Belanda, yaitu

Hoorn. Namun usul itu tidak digubris oleh para petinggi VOC di Amsterdam,

yaitu Heeren Seventien yang lebih setuju nama Batavia, yang ternyata sudah

sejak 12 Maret 1619 digunakan untuk nama sebuah kastil yang merangkap

benteng yang menjadi pusat kegiatan VOC pertama kali di Jayakarta (Lohanda,

2007, hlm.5) Batavia merujuk penyebutan negeri Belanda dimasa lalu. Namun

menurut Hadrianus Julianus dalam Kartodirdjo (1988, hlm.159) Batavia berarti

Bato's Have, tempat tinggal Bato, yaitu Pahlawan Suku (Stamhero). Namun, jika

menilik pada Perintah Heeren XVII pada Oktober 1617, disitu ditegaskan bahwa

daerah mana pun yang dipilih sebagai tempat rendezvous haruslah disebut

Batavia. Nama ini sengaja dipilih sebagai kenangan pada Uni Provinsi-Provinsi

Nederland Merdeka (Republik Bataaf), yang melawan penjajahan Spanyol

(Simbolon, 2006, hlm.38)

Penguasaan atas Jayakarta yang kemudian diganti menjadi Batavia,

membuat VOC secara tidak langsung telah menguasai salah satu titik terpenting

dalam jalur pelayaran dan perdagangan di Nusantara, yaitu laut Jawa sebagaimana

Houben berpendapat dalam Sulistiyono (2004, hlm.30):

kehidupan masyarakat yang melingkunginya.

Laut Jawa bukan hanya sebagai laut utama bagi Indonesia, tetapi juga merupakan laut inti bagi Asia Tenggara. Jadi bisa dikatakan bahwa laut Jawa merupakan Mediterranean Sea bagi Indonesia bahkan bagi Asia Tenggara. Sebagai "Laut Tengah"-nya Indonesia dan bahkan Asia Tenggara, sudah barang tentu laut Jawa menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai komunitas yang berada di sekitarnya baik dalam kegiatan budaya, politik, maupun ekonomi. Dengan demikian laut Jawa tentu memiliki fungsi kohesif yang mengintegrasikan berbagai elemen

Coen mempunyai rencana yang tidak terbatas pada kepulauan Nusantara. Dia bermaksud membangun imperium komersial yang besar di Asia dengan ibukotanya Batavia, kota yang didirikannya. Coen langsung memerintahkan pembangunan satu benteng baru yang lebih besar dan satu kota "Belanda" yang kecil, yang dibangun dalam beberapa tahun berikutnya mengikuti gaya di negeri leluhur, dengan kanal dan jembatan. Dia tidak tertarik sama sekali dengan perkembangan politik di pedalaman kepulauan Indonesia. Yang paling penting baginya hanyalah mempertahankan beberapa posisi Belanda yang ingin dia bangun, dan kontrol atas laut. Dengan penaklukan Jayakarta dan pendirian Batavia diikuti blokade atas pelabuhan Banten, orang Belanda berhasil

mengontrol laut Jawa (Vlekke, 2010, hlm.152-157).

Pada waktu itu Belanda menguasai jalur-jalur pelayaran yang menghubungkan *enclave-enclave* mereka seperti Makassar, Manado, Ternate, Ambon, Banda, Bima, Kupang, Banjarmasin, Sambas, Pontianak, Palembang, Lampung, Padang, dan pelabuhan-pelabuhan di Jawa (Sulistiyono, 2004, hlm.83). Sejak saat itu jaringan perdagangan yang telah terbentuk selama berabad-abad di

Nusantara berubah seiring meluasnya kekuasaan VOC yang berpusat di Batavia.

Pada dasarnya kolonialisme yang terjadi terhadap kepulauan Nusantara atau yang kemudian kita kenal sebagai Hindia Belanda, bisa kita telusuri awal mulanya dari Kota Pelabuhan Batavia ini. Terutama pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen sebagai pembuka kibaran "sayap

kekuasaan" kolonial Belanda dan juga sebagai pendiri kota Batavia yang hingga

saat ini masih menduduki posisi terhormat sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam

mengenai peran Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen dalam membangun kota

Batavia sebagai kota pelabuhan tahun 1619-1629.

Tulisan ini memfokuskan kajiannya pada peranan Jan Pieterszoon Coen

dalam upaya membangun Kota Pelabuhan Batavia tahun 1619-1629. Adapun

alasan pemilihan tokoh Jan Pieterszoon Coen ialah, pertama, Wacana mengenai

Negara Hindia yang ia cetuskan pada abad ke-17 telah membuat orientasi VOC

yang awalnya hanya memonopoli perdagangan menjadi penguasaan wilayah yang

kemudian berbuah penjajahan yang sangat panjang di Nusantara.

Kedua, Jan Pieterszoon Coen merupakan pahlawan bagi kolonialisme

Belanda di Indonesia, bagaimana pun idenya mengenai pendirian negara Hindia

dan pemindahan secara besar-besaran orang-orang Belanda ke tempat yang

dikuasainya telah menancapkan akar kekuasaan kolonial Belanda yang sangat

kuat sehingga bisa bertahan selama lebih dari 300 tahun. Sebagai tanda

kehormatan, di tempat kelahirannya di Negeri Belanda tepatnya di kota Hoorn

dibuatkan patung yang melambangkan keperkasaan dan jasanya terhadap

kepentingan Belanda di Nusantara. Seperti halnya di Hoorn, di Batavia ia pun

dibuatkan sebuah patung sebagai tanda penghormatan, namun pada masa

penjajahan Jepang patung itu di jatuhkan.

Ketiga, Jan Pieterszoon Coen merupakan seorang Gubernur Jenderal yang

sepak terjangnya sangat terinventarisir dengan baik dalam Daghregister, yaitu

catatan hariannya selama menjadi Gubernur Jenderal yang masih tersimpan

dengan baik dan jumlahnya pun melimpah di Arsip Nasional Republik Indonesia.

Adapun alasan pemilihan pembangunan Kota Pelabuhan Batavia ialah

karena berkaitan dengan ide Jan Pieterszoon Coen untuk menjadikan kota ini

sebagai pusat koordinasi perdagangan VOC di Asia. Sangat menarik untuk

mengkaji bagaimana Coen membangun kota pelabuhan ini dengan visi besarnya

untuk menguasai perdagangan Asia. Selain itu, tetap bertahannya kota Batavia

yang sekarang menjadi Jakarta sebagai pusat pemerintahan menjadi alasan lain

bagi penulis untuk menggali lebih dalam lagi bagaimana kota ini dibentuk

sehingga bisa mempertahankan hegemoni sampai lebih dari 400 tahun sejak

didirikan.

Tahun 1619-1629 diambil untuk membatasi kajian penulis agar tidak

terlalu melebar dan lebih terfokus pada masa pemerintahan Jan Pieterszoon Coen.

Meskipun penulis menyadari bahwa periode pemerintahan Coen terjadi dua kali

yaitu antara 1618-1623 dan 1627-1629 membuat ada sedikit ketidak sesuaian

karena ada periode pemerintahan Gubernur Jenderal yang lain pada 1623-1627.

Namun setelah penelusuran penulis mengenai hal tersebut penulis memutuskan

untuk tidak membagi dua periode kajian, ini dikarenakan pengganti Coen pada

masa selang adalah Gubernur Jenderal yang satu ideologi dengan Coen dan

hampir dipastikan pengaruh pemikiran Coen diteruskan pula, itu artinya peranan

Coen masih kuat pada masa itu meskipun ia tidak berperan sebagai Gubernur

Jenderal.

Berdasarkan beberapa asumsi di atas, maka penulis bermaksud

mengangkat hal tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul Peranan Jan

Pieterszoon Coen dalam Membangun Batavia sebagai Kota Pelabuhan tahun

1619-1629. Maksud yang terkandung pada judul di atas adalah tanggapan, sikap

dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jan Pieterszoon Coen dalam

membangun Batavia sebagai Kota Pelabuhan tahun 1619-1629.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi pokok

permasalahan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana peranan Jan Pieterzoon

Coen dalam membangun Batavia sebagai Kota Pelabuhan tahun 1619-1629?"

Deri Septi Efendi, 2015

PERANAN JAN PIETERSZOON COEN DALAM MEMBANGUN BATAVIA SEBAGAI KOTA PELABUHAN

Agar permasalahan yang ada di penelitian ini tetap terfokus dan terkaji dengan

baik, maka penulis membatasi permasalahan tersebut ke dalam bentuk

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Batavia pada masa sebelum Jan Pieterszoon Coen

memerintah di Batavia?

2. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jan Pieterzoon Coen

dalam rangka membangun Batavia sebagai Kota Pelabuhan?

3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Jan Pieterszoon Coen dalam

membangun Batavia sebagai Kota Pelabuhan?

4. Bagaimana kemajuan yang dicapai Batavia setelah proses pembangunan

Kota Pelabuhan yang dilakukan oleh Jan Pieterzoon Coen?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum berdasarkan beberapa pokok rumusan masalah yang telah dituliskan

sebelumnya, tujuan utama yang ingin dicapai penulis yakni mendeskripsikan

mengenai peranan Jan Pieterzoon Coen dalam membangun Batavia sebagai Kota

Pelabuhan tahun 1619-1629. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

untuk:

1. Memperoleh gambaran mengenai kondisi Batavia pada masa sebelum Jan

Pieterszoon Coen memerintah.

2. Menganalisis kebijakan-kebijakan Politik, Ekonomi dan Sosial yang

diambil oleh Jan Pieterszoon Coen di Batavia.

3. Menganalisis kendala-kendala yang dikeluarkan Jan Pieterszoon Coen

dalam membangun Batavia sebagai Kota Pelabuhan Vereenigde

Oostindische Compagnie.

4. Mengeksplorasi kemajuan yang dicapai Batavia setelah proses

pembangunan Kota Pelabuhan Vereenigde Oostindische Compagnie yang

dilakukan Jan Pieterszoon Coen.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat

bagi semua pihak khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan sejarah

terutama kajian mengenai tokoh Jan Pieterszoon Coen sebagai pendiri Batavia.

Manfaat disusunnya penelitian ini adalah:

1. Mengenal tokoh dan pemikiran Jan Pieterzoon Coen.

2. Memperkaya pemahaman mengenai salah satu tokoh paling berpengaruh

dalam berdirinya kota Batavia sebagai pusat pemerintahan Kolonial

Belanda.

3. Mengilhami para pemangku kebijakan dalam mengatasi persoalan di

Ibukota Jakarta.

4. Menambah literatur sejarah mengenai tokoh di era Kolonial, khususnya di

jurusan Pendidikan Sejarah.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun struktur organisasi skripsi ini, adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada BAB ini akan dipaparkan masalah dan alasan

penulis mengkaji penelitian mengenai peranan Jan Pieterszoon Coen dalam

membangun Batavia sebagai Kota Pelabuhan tahun 1619-1629. Selain latar

belakang pada BAB I ini didalamnya terdapat Sub BAB yakni, Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi Skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, akan memaparkan mengenai buku-buku ataupun

sumber penelitian lainnya yang menjadi sumber utama penulis dalam melakukan

penelitian mengenai Peranan Jan Pieterszoon Coen dalam membangun Batavia

sebagai Kota Pelabuhan tahun 1619-1629, yang dapat berupa buku maupun arsip

serta sumber internet yang telah dianggap relevan oleh penulis.

BAB III Metode Penelitian, dalam BAB ini penulis memaparkan

mengenai metode atau proses yang dilaksanakan dalam melakukan penelitian.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode historis serta

studi literatur dan studi dokumentasi dalam melakukan heuristik. Proses penelitian

disesuaikan dengan Pedoman Penelitian Karya Ilmiah UPI dan berdasarkan Ejaan

Yang Disempurnakan (EYD).

BAB IV pembangunan Batavia sebagai Kota Pelabuhan di bawah

kepemimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, BAB ini akan

memaparkan hasil penelitian yang didasarkan atas data dan fakta yang diperoleh

selama penelitian dilakukan mengenai peranan Jan Pieterszoon Coen dalam

membangun Batavia sebagai Kota Pelabuhan. Dalam BAB ini akan dipaparkan

kondisi Batavia pada masa sebelum Jan Pieterszoon Coen, kebijakan yang

ditempuh oleh Jan Pieterzoon Coen di Batavia, kendala-kendala yang dihadapi

Jan Pieterszoon Coen dalam membangun Batavia sebagai Kota Pelabuhan, dan

kondisi Batavia setelah pemerintahan Jan Pietesrzoon Coen.

BAB V Kesimpulan dan Saran, BAB ini merupakan pembahasan terakhir

di mana penulis memberikan suatu kesimpulan dari hasil interpretasi terhadap

kajian penelitian. Interpretasi penulis ini disertai dengan analisis penulis dalam

membuat kesimpulan atas jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan

yang dirumuskan dalam suatu rumusan masalah. Selain itu, dalam BAB ini juga

berisikan saran dari penulis yang diajukan kepada berbagai pihak yang terkait

dengan penelitian ini.